

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanduk Afrika merupakan sebuah semenanjung di Afrika Timur yang meliputi wilayah Somalia, Djibouti, Eritrea dan Ethiopia. Namun, menurut definisi *The Institute for Environmental Security*, Tanduk Afrika memiliki cakupan wilayah yang lebih luas termasuk wilayah Sudan, Kenya, dan Uganda. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan wilayah perairan seperti Laut Merah, Teluk Aden dan Samudra Hindia.¹ Keberadaan Tanduk Afrika di sekitar wilayah perairan merupakan posisi yang strategis sebagai jalur laut internasional. Terbukti bahwa Teluk Aden yang berbatasan dengan Tanduk Afrika menjadi salah satu jalur laut tersibuk di dunia yang menghubungkan perdagangan antara Asia dan Eropa, yang melalui Laut Merah dan Terusan Suez.² Total sekitar 7 % dari transportasi maritim dunia melewati Terusan Suez yang berarti bahwa antara 1.700 hingga 2.000 kapal melewati jalur laut tersebut setiap bulannya.³

Namun di balik posisinya yang strategis, perairan lepas Tanduk Afrika memiliki permasalahan yaitu kasus pembajakan yang sama halnya dengan wilayah Selat Malaka.⁴ Pembajakan terus meningkat terutama semenjak gagalnya pemerintahan Somalia yang mengakibatkan Perang Sipil tahun 1991.⁵ Fenomena

¹ Eric van de Giessen, "Horn of Africa : Environmental Security Assessment", Institute for Environmental Security, The Netherlands, (January 2011) : hal 26.

² Jessica Larsen and Christine Nissen, "Learning for Danish Counter-Piracy off the Coast of Somalia", Danish Institute for International Studies Report, (2017) : hal 8.

³ Lars Bangert Struwe, "For a Greater Horn of Africa Sea Patrol", Danish Institute for Military Studies, (March, 2009) : hal 9.

⁴ Mohd. Agoes Afiya, "Indonesia's Global Maritime Fulcrum : Contribution in the Indo Pacific Region", Andalas Journal of International Studies, Vol.6, No.2, (November,2017) : hal 152.

⁵ James M. Bridge, "Safe Seas at What Price ? The Costs, Benefits and Future of NATO's Operation Ocean Shield", Research Division-NATO Defence College, No. 95, (September, 2013).

ini dilatarbelakangi oleh Somalia sebagai *fragile state* yang berarti bahwa Somalia memiliki yurisdiksi yang lemah, krisis dalam hal kemanusiaan dan keamanan, pengangguran yang tinggi, serta negaranya yang miskin.⁶ Selain itu, hal yang mendasar ialah bajak laut yang sudah menjadi suatu pekerjaan bagi masyarakat Somalia.⁷ Akibatnya, jumlah pembajakan semakin meningkat sebagaimana laporan dari *International Maritime Bureau (IMB)* yang menyatakan bahwa jumlah pembajakan kurang dari 30 kasus di tahun 2006 dan mencapai angka 236 kasus di tahun 2011.⁸

Adanya pembajakan kemudian menimbulkan berbagai dampak terhadap wilayah Tanduk Afrika maupun pengguna jalur laut. Bagi Tanduk Afrika khususnya Somalia, pembajakan menyebabkan kesenjangan ekonomi dan berjalannya arus perekonomian yang tidak sehat di wilayah tersebut.⁹ Bagi pengguna jalur laut secara umum, hal ini menimbulkan kerugian global hingga US\$ 16 miliar per tahun dan penurunan pendapatan Terusan Suez sebanyak US\$ 35 juta dari tahun 2007 ke tahun 2008 yang diakibatkan oleh tindakan beberapa perusahaan yang mengambil langkah sementara untuk merubah jalur laut menuju Tanjung Harapan di Afrika Selatan.¹⁰

Tidak hanya itu, bagi negara pelaut seperti Denmark juga merasakan dampak dari pembajakan. Hal ini bermula dari pembajakan kapal MV *Danica White* milik Denmark yang di bajak di Teluk Aden pada tanggal 1 Juni 2007.

⁶ Ministry of Foreign Affairs of Denmark, "Strategy for the Danish Counter – Piracy Effort 2011 – 2014", Denmark, (2011) : hal 4.

⁷ Lars Bangert Struwe : hal 5.

⁸ International Maritime Bureau, "Piracy and Armed Robbery Against Ships : Annual Report 2012", International Chamber of Commerce, (January, 2013) : hal 5.

⁹ Alexandre Maouche, "Piracy along the Horn of Africa: An Analysis of the Phenomenon within Somalia", (Juni 2011) : hal 32.

¹⁰ Prof Theo Neethling, "Piracy Around Africa's West and East Coasts : A Comparative Political Perspective", *South African Journal of Military Studies*, Vol.38 No.2, Department of Political Science, University of the Free State, (2010) : hal 94-95.

Kapal tersebut dibajak oleh bajak laut Somalia dan dibebaskan dengan tebusan sebanyak US\$ 1,5 juta.¹¹ Adanya peristiwa tersebut kemudian menimbulkan kesadaran bagi Denmark bahwa dibutuhkan perhatian khusus terhadap masalah pembajakan. Kementerian Luar Negeri Denmark menyatakan bahwa perang melawan pembajakan menjadi salah satu prioritas kebijakan keamanan Denmark. Namun, setelah peristiwa Danica White masih terdapat beberapa penyerangan bajak laut Somalia terhadap kapal Denmark. Menurut laporan *ICC International Maritime Bureau* dari tahun 2007 hingga tahun 2012 yang dikumpulkan oleh penulis, terjadi 10 serangan bajak laut Somalia terhadap kapal Denmark. Pembajakan bukanlah permasalahan yang dapat diselesaikan sendiri oleh industri pelayaran, namun hal ini merupakan tantangan bagi perdagangan internasional dan komunitas internasional.¹²

Adanya keinginan Denmark semakin diperkuat oleh beberapa kepentingannya dalam melawan pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika. Pertama, secara historis Denmark mengendalikan 10 % pelayaran maritim dunia¹³ dan sekitar 10 hingga 15 kapal Denmark berlayar setiap hari disekitar Teluk Aden, lepas pantai Somalia dan Samudra Hindia.¹⁴ Denmark memiliki banyak industri pelayaran salah satunya A.P Moller-Maersk (APMM) yang menjadikan perairan lepas Tanduk Afrika sebagai akses penting dalam transaksi perdagangannya. APMM melalui kapalnya yaitu Tripel-E menggunakan rute pelayaran Eropa-Asia sebagai *The Single Journey*. Rute yang digunakan melewati

¹¹ Port News, "Somalia Pirates Free Danica White", (August 23rd 2007), diakses melalui <http://www.en.portnews.ru/news/6070/> pada tanggal 17 Januari 2019.

¹² Maersk : hal 22.

¹³ Jessica Larsen and Christine Nissen : hal 19.

¹⁴ Ministry of Foreign Affairs of Denmark, "Strategy for the Danish Counter – Piracy Effort 2011 – 2014" : hal 23.

perairan lepas Tanduk Afrika untuk dapat menyinggahi pelabuhan Tanjung Pelepas dan Terusan Suez.¹⁵ Pemilihan rute ini dikarenakan Tripel-E mengharapkan pertumbuhan ekonomi melalui pelayaran Eropa-Asia dan hanya pelabuhan disekitar jalur laut tersebutlah yang mampu mewedahi pelayaran bagi kapal Tripel-E.¹⁶ Adapun kontribusi Denmark dalam melindungi industri pelayaran dari tindakan pembajakan didasari oleh keuntungan yang didapatkan dari pajak pelayaran¹⁷ dan keengganan pertahanannya dikuasai oleh penjaga bersenjata sipil.¹⁸ Maka, disinilah dibutuhkan kerjasama antara negara dengan industri pelayaran. Denmark pun memiliki persepsi bahwa melindungi perairan lepas Tanduk Afrika dari tindakan pembajakan sekaligus dapat melindungi industri pelayaran Denmark. Kedua, sebagai negara pelaut Denmark ingin mempertahankan kemampuan angkatan lautnya untuk dapat berpartisipasi dalam melawan pembajakan Ketiga, Denmark ingin mengedepankan multilateralisme yang memberikan peluang bagi Denmark untuk menyampaikan nilai-nilai keamanan dan menjalin kerjasama dengan angkatan militer yang juga melakukan strategi kontra pembajakan.¹⁹

Beberapa hal tersebut sekaligus mendasari alasan Denmark mengeluarkan *Strategy for the Danish Counter Piracy Effort 2011-2014* yang berkontribusi dalam mewujudkan perairan lepas Tanduk Afrika aman sebagai pelayaran

¹⁵ “Maersk Ship Sets World Record For Most Cargo”, 2014, diakses melalui <http://maritime-connector.com/news/general/maersk-ship-sets-world-record-for-most-cargo/> pada tanggal 6 Mei 2019.

¹⁶ CNN, “Maersk Tripel-E : Introducing the World’s Biggest Ship, (June 2013) diakses melalui <http://edition.cnn.com/2013/06/26/business/maersk-triple-e-biggest-ship/index.html> pada tanggal 10 Juli 2019.

¹⁷ Deloitte Shipping & Ports Group, “Shipping Tax Guide Greece, Australia, Cyprus, Denmark, Indonesia, Italy, Luxembourg, Malta, Philippines, Singapore, Thailand, UK, Vietnam”, 2015 : hal 45.

¹⁸ Jessica Larsen and Christine Nissen : hal 44.

¹⁹ Jessica Larsen and Christine Nissen : hal 19-21.

Denmark dan aman sebagai pelayaran internasional dengan tiga struktur yaitu melawan pembajakan, melindungi pelayaran maritim, serta membangun kapasitas dalam sektor keamanan maritim.²⁰ Namun, adanya tindakan Denmark dalam mengeluarkan strategi kontra pembajakan mengejutkan banyak pihak dikarenakan latar belakang Denmark sebagai negara kecil. Denmark merupakan satu dari 19 negara anggota EU yang dikategorikan sebagai negara kecil berdasarkan voting Dewan Menteri terhadap 27 negara anggota EU.²¹ Pengkategorian Denmark sebagai negara kecil didasari oleh populasi dan luas wilayahnya yang kecil dimana Denmark memiliki populasi sebanyak 5.785.864 pada tahun 2017 dan luas wilayah 42.895 km².²² Namun, hal yang menjadi tantangan bagi negara kecil yaitu memiliki sumber daya yang terbatas seperti keterbatasan negosiator yang mampu mempengaruhi kesepakatan dalam suatu forum. Negara kecil memiliki delegasi yang kecil dengan kerja individu yang tinggi dan dibutuhkan usaha yang besar agar suara negara kecil dapat didengarkan.²³ Menurut Kassim dan Poter, negara kecil cenderung kurang mampu menawarkan strategi persuasi terhadap mitra kerja.²⁴

Kemudian, Denmark dihadapkan pada *European Union (EU)* yang juga mengupayakan tindakannya di perairan lepas Tanduk Afrika. Bahkan, Denmark yang merupakan bagian dari EU tidak dapat terlibat di dalam *European Union Naval Force (EUNAVFOR)* dikarenakan penolakan Denmark terhadap ketentuan

²⁰ Ministry of Foreign Affairs of Denmark, "Strategy for the Danish Counter – Piracy Effort 2011 – 2014" : hal 9.

²¹ Diana Panke , "Small States in the European Union : Coping with Structural Disadvantages", England : Ashgate Publishing Limited, 2010 : hal 15.

²² Pusekinfokom KP Kementrian Luar Negeri, "Sekilas Negara Denmark", 2017, diakses melalui <https://pasarmerop.kemlu.go.id/id/eropa/denmark/sekilas> pada tanggal 30 Maret 2019.

²³ Diana Panke , "Small States in the European Union: Structural Disadvantages in EU Policy-Making and Counter-Strategies", Journal of European Public Policy, 2010 : hal 25.

²⁴ Micallef Grimaud. J, "Small States and EU Governance". European : Springer, 2018 : hal 25.

Perjanjian Maastricht.²⁵ Hal ini menjadi kendala bagi Denmark yaitu keterbatasan ruang lingkup dalam kebijakannya.²⁶ Mantan Menteri Pertahanan Denmark, Haekkerup mengatakan bahwa operasi EUNAVFOR yaitu *Operation Atalanta* memiliki keunggulan dari segi politik, diplomasi, ekonomi maupun manajemen konflik dibandingkan operasi Denmark yang melakukan koordinasi dengan *North Atlantic Treaty Organization (NATO)*.²⁷

Meskipun banyak hal yang dihadapi oleh Denmark, ini tidak menutup kemungkinannya dalam mengamankan wilayah maritim. Denmark menunjukkan bahwa ia berperan aktif dalam partisipasi militer di perairan lepas Tanduk Afrika dengan memperlihatkan beberapa pencapaian.²⁸ Dengan latar belakang sebagai negara kecil ternyata Denmark mampu berperan aktif dalam operasi militer bersama NATO dan Amerika Serikat (AS) dan terlibat di dalam badan koordinasi kontra pembajakan. Kemudian, Denmark menjadi salah satu negara donor dalam mengembangkan kapasitas di Afrika Timur baik dari segi militer maupun dari segi finansial.

Berdasarkan beberapa hal diatas, penulis merasa bahwa penelitian ini penting untuk mengkaji mengenai tindakan sebuah negara kecil yang mempunyai kapabilitas yang tidak sebanding dengan EU tetapi mampu menunjukkan bahwa ia dapat berperan aktif di perairan internasional dan berupaya dalam mengamankan wilayah maritim.

²⁵ Perjanjian Maastricht merupakan sebuah perjanjian yang lahir pada tanggal 7 Februari 1992 yang mengatur beberapa hal yaitu *Economic and Monetary Union (EMU)*, *Justice and Home Affairs (JHA)*, *Common Security and Defence Policy (CSDP)* dan *Citizen in EU*. Pada tanggal 2 Juni 1992 Denmark menolak untuk meratifikasi perjanjian tersebut dan memilih keluar dari empat aspek di atas yang mengakibatkan Denmark tidak dapat terlibat dalam operasi militer bersama EU. https://english.eu.dk/en/denmark_eu/danishopouts diakses pada tanggal 19 Maret 2019.

²⁶ Jessica Larsen and Christine Nissen : hal 51.

²⁷ Lars Bangert Struwe : hal 52.

²⁸ Jessica Larsen and Christine Nissen : hal 26-40.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika memiliki dampak terhadap wilayahnya dan pengguna jalur laut salah satunya Denmark yang mengendalikan 10 % pelayaran maritim dunia. Denmark kemudian mengeluarkan *Strategy for the Danish Counter Piracy Effort 2011-2014* yang berkontribusi dalam mewujudkan perairan lepas Tanduk Afrika aman sebagai pelayaran Denmark dan aman sebagai pelayaran internasional. Strategi ini didasari oleh keinginan Denmark dalam melindungi pelayaran maritim, mempertahankan kemampuan angkatan lautnya sebagai negara pelaut dan mengedepankan multilateralisme. Namun dalam mewujudkan kebijakannya, Denmark dihadapkan pada latar belakang sebagai negara kecil dan tindakan penyisihan EU dalam strategi kontra pembajakannya. Meskipun demikian, Denmark menunjukkan beberapa pencapaian dalam mengamankan wilayah maritim. Maka, menarik untuk diketahui kehadiran negara kecil yang mampu berperan aktif di perairan internasional melalui kebijakan keamanan maritimnya di perairan lepas Tanduk Afrika.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang hendak dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana upaya Denmark dalam mengamankan wilayah perairan lepas Tanduk Afrika dari tindakan pembajakan?

1.4 . Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Denmark dalam mengamankan wilayah maritim dari tindakan pembajakan di

perairan lepas Tanduk Afrika.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, diantaranya :

1. Dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi pembaca untuk memahami kehadiran negara kecil dengan caranya sendiri bertindak dalam mengamankan jalur laut internasional.
2. Dapat berguna bagi mahasiswa khususnya dibidang ilmu hubungan internasional yang ingin mendalami tindakan pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika yang kemudian menimbulkan upaya dari Denmark untuk mengamankan wilayah tersebut melalui kebijakan keamanan maritim.

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan studi pustaka sebagai acuan penelitian bagi penulis. Untuk itu, penulis akan menjelaskan secara ringkas beberapa bahan bacaan berupa jurnal atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Tulisan pertama yaitu dengan judul “Somalia’s Pirate Cycle : The Three Phase of Somali Piracy” oleh Edward R. Lucas.²⁹ Di dalam jurnalnya, Edward menyatakan terdapat lebih dari 30 negara yang telah menempatkan kapal perang ke perairan di lepas pantai Tanduk Afrika. Meskipun terdapat angkatan laut di wilayah tersebut, jumlah pembajakan masih meningkat dari tahun 2006 hingga tahun 2011. Namun, pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah pembajakan

²⁹ Edward R. Lucas, "Somalia's Pirate Cycle: The Three Phases of Somali Piracy", *Journal of Strategic Security*, Vol.6 No.1, (2013) : hal 55-63.

sebanyak 65 % dibandingkan tahun sebelumnya. Di dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa terdapat peningkatan aktivitas bajak laut Somalia yang terjadi dalam 3 fase. Fase pertama yaitu pada tahun 1990an hingga tahun 2000an yang beroperasi di Teluk Aden. Fase kedua yaitu pada tahun 2005 yang memiliki jangkauan lebih luas yaitu hingga ke Samudra Hindia dengan kelompok bajak laut yang lebih besar dan terorganisir. Sedangkan fase ketiga yaitu pada tahun 2007. Adanya penjelasan ini memberikan informasi bagi penulis untuk dapat menjelaskan bagaimana peningkatan jumlah tindakan pembajakan hingga fase-fase peningkatan aktivitas bajak laut Somalia yang menjadi suatu tantangan bagi dunia internasional dalam menanggulangnya. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah dalam hal cakupan penelitian yang mana jurnal ini hanya membahas mengenai bajak laut Somalia sedangkan penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas mulai dari bajak laut Somalia hingga upaya Denmark untuk mengamankan wilayah tersebut.

Tulisan yang kedua ialah jurnal dengan judul “Countering the Somali Pirates : Harmonizing the International Response” oleh Richard Weitz.³⁰ Dalam tulisan tersebut, ia menyampaikan bahwa kasus pembajakan dapat mengancam rute perdagangan penting yang menghubungkan Afrika, Asia dan Eropa. Untuk menghindari bajak laut, beberapa perusahaan pelayaran melakukan perubahan rute agar tidak melewati Terusan Suez yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang dan kenaikan biaya. Dengan adanya kasus pembajakan, menimbulkan respon internasional untuk melakukan patroli kapal dan pengawalan kapal dagang, diantaranya PBB, NATO, EU dan negara-negara lainnya. PBB melakukan

³⁰ Richard Weitz, "Countering the Somali Pirates: Harmonizing the International Response", *Journal of Strategic Security* 2, Vol.2 No.3, (September, 2009) : hal 1-12.

tindakan untuk memanggil organisasi internasional maupun negara-negara untuk melawan pembajakan. Dengan adanya hal itu, EU membangun *Operation Atalanta* dan NATO di Tanduk Afrika membentuk *Standing NATO Maritime Group 1 (SNMGI)* yang terdiri dari kapal-kapal yang berputar di wilayah tersebut seperti kapal Kanada, Denmark, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol dan AS. Dari tulisan diatas, penulis mendapatkan informasi bahwa kasus pembajakan memiliki berbagai dampak terhadap perdagangan internasional di perairan tersebut yang mana hal ini dibutuhkan oleh penulis untuk menjelaskan berbagai respon internasional dalam menanggulangi tindakan pembajakan, termasuk didalamnya Denmark yang melakukan partisipasi pada operasi NATO di Tanduk Afrika. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah dalam hal kefokusannya terhadap kasus pembajakan, yang mana jurnal ini membicarakan beberapa respon internasional secara umum sementara penelitian penulis membicarakan respon Denmark secara khusus.

Selanjutnya, penulis mengambil studi pustaka yaitu tulisan dengan judul “How Piracy is Affecting Economic Development in Puntland, Somalia” oleh Jonathan R. Beloff.³¹ Dalam tulisannya, dikatakan bahwa sekelompok orang Somalia memilih dan dipaksa menjadi bajak laut karena kurangnya kesempatan bekerja di tempat lain untuk memenuhi perekonomian mereka. Langkah yang mereka lakukan ialah mencari sponsor keuangan untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan untuk membajak kapal. Di samping itu, jurnal ini juga menyajikan kemungkinan solusi untuk mengurangi pembajakan. Pertama adalah operasi militer untuk menghentikan atau menghadang serangan bajak laut.

³¹ Jonathan R. Beloff, “How Piracy is Affecting Economic Development in Puntland, Somalia”, *Journal of Strategic Security*, Vol.6, No.1, New York University, (2013) : hal 47-54.

Sedangkan hal yang kedua adalah mengembangkan perekonomian Somalia untuk menghentikan alasan awal mengapa masyarakat yang ada di Somalia beralih menjadi bajak laut. Selain itu, komunitas internasional telah mengajukan resolusi dan pengiriman pasukan angkatan laut untuk menghentikan pembajakan di Somalia. Adanya penjelasan ini memberikan informasi bagi penulis untuk mengetahui solusi dari adanya pembajakan dan bagaimana pengaplikasiannya baik itu melalui operasi militer ataupun kebijakan yang di keluarkan oleh komunitas internasional. Hal yang menjadi perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah jurnal ini hanya membahas bagaimana pembajakan di Somalia serta solusi yang disajikan, sedangkan penelitian penulis berawal dari pembajakan disekitar perairan Somalia hingga munculnya kebijakan keamanan maritim Denmark.

Tulisan keempat yaitu jurnal yang berjudul “Combating Piracy in East Africa” oleh W.Michael Reisman dan Bradley T.Tennis.³² Melalui jurnalnya, terdapat beberapa karakter pembajakan di Afrika Timur diantaranya serangan terhadap kapal-kapal yang dibajak dan ditahan untuk dimintai tebusan, hingga adanya kasus penyanderaan awak kapal. Pembajakan di Afrika Timur juga dibedakan oleh ukuran dan sifat kapal-kapal yang ditargetkan untuk diserang. Selanjutnya, hal yang menjadi suatu tantangan untuk melawan pembajakan di Afrika Timur ialah wilayahnya yang berbatasan dengan perairan yang luas yaitu Teluk Aden hingga Samudra Hindia sehingga sulit untuk melakukan pengawasan, lain hal dengan kasus pembajakan di Selat Malaka yang memiliki cakupan wilayah yang lebih kecil dan dikelilingi oleh negara-negara yang stabil.

³² W. Michael Reisman and Bradley T.Tennis, “Combating Piracy in East Africa”, *The Yale Journal of International Law Online*, Vol.35 No.14, (2009) : hal 15-23.

Penjelasan ini berguna bagi penulis untuk mengidentifikasi bentuk pembajakan dan tantangan yang ada di Afrika Timur yang mana tantangan ini juga merupakan tantangan bagi Denmark dalam mengupayakan tindakannya di perairan lepas Tanduk Afrika. Hal yang menjadi perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah jurnal ini membahas karakter dari pembajakan di Afrika Timur serta peningkatan kasus pembajakan, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada kebijakan maritim Denmark terhadap kasus pembajakan.

Selanjutnya, tulisan yang terakhir yaitu jurnal dengan judul “Operasi Atalanta oleh Uni Eropa di Teluk Aden dalam Menangani Perompak Somalia Periode Tahun 2009-2013” oleh Hafid Dwi Prasetyo.³³ Di dalam tulisannya, ia menjelaskan mengenai jumlah penebusan kapal-kapal yang dibajak di Somalia yang mana diperkirakan mencapai US\$ 18 juta hingga US\$ 30 juta dan meningkat hingga US\$ 50 juta pada akhir tahun 2008. Sedangkan di tahun 2010 biaya tebusan yang diminta berkisar antara US\$ 690.000 hingga US\$ 3 juta, dan kemudian dinaikkan lagi hingga US\$ 9 juta. Selain itu, di dalam jurnal ini juga terdapat dampak dari adanya pembajakan yang menyebabkan industri pelayaran mencari rute lain selain Terusan Suez yaitu ke wilayah Tanjung Harapan. Jika melewati wilayah ini akan menambah biaya asuransi perjalanan kapal karena rute ini menyebabkan perjalanan lebih jauh hingga sejauh 3.500 mil. Hal inilah yang menimbulkan inisiatif bagi EU untuk membentuk *Operation Atalanta* sebagai bagian dari angkatan laut di perairan lepas Tanduk Afrika. Adanya penjelasan diatas dapat memberikan informasi bagi penulis mengenai peningkatan biaya tebusan yang diminta oleh perompak hingga kerugian jika memilih rute lain selain

³³ Hafid Dwi Prasetyo, “Operasi Atalanta oleh Uni Eropa di Teluk Aden dalam Menangani Perompak Somalia Periode Tahun 2009-2013”, *Journal of International Relations*, Vol.2 No.1, (2016) : hal 57-66.

Terusan Suez. Disamping itu, jurnal ini juga memberikan gambaran mengenai *Operation Atalanta* yang hadir sebagai salah satu operasi di Tanduk Afrika di samping Denmark dan NATO. Hal yang menjadi perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah dari segi aktor yang melakukan partisipasi dalam melawan pembajakan yang mana tulisan ini membahas *Operation Atalanta* oleh EU di Teluk Aden, sedangkan penelitian penulis membahas kebijakan maritim Denmark di perairan lepas Tanduk Afrika.

1.7 Kerangka Konseptual

Untuk dapat menganalisis suatu penelitian, maka dibutuhkan konsep-konsep atau pendapat ahli yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Konsep merupakan kata yang melambangkan gagasan dan memiliki fungsi untuk memperkenalkan sudut pandang.³⁴ Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan satu konsep dalam penelitian ini yaitu konsep keamanan maritim menurut Christian Bueger dan Timothy Edmunds.

Keamanan maritim mengacu pada tindakan yang muncul akibat adanya ancaman yang mengganggu stabilitas kemaritiman berupa sengketa antar negara maritim, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan narkoba, penangkapan ikan ilegal, kejahatan lingkungan, dan bentuk kejahatan laut lainnya.³⁵ Menurut Christian Bueger dan Timothy Edmunds, lingkungan maritim dipahami sebagai sesuatu yang kompleks terhadap masalah keamanan dan dibutuhkan yurisdiksi serta koordinasi untuk menghadapi tantangan. Keamanan maritim mulai dikenal pada tahun 1990an dan menjadi perhatian internasional ketika berkembangnya

³⁴ Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi", Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, (1990) : hal 109-110.

³⁵ Christian Bueger, "What is Maritime Security", *Journal of Ocean Policy*, Vol.53, Cardiff University, School of Earth and Ocean Sciences, (2015) : hal 159.

kejahatan maritim pada tahun 2000an seperti pembajakan di lepas pantai Somalia, perdagangan manusia di wilayah perairan dan sebagainya. Hal ini menjadi alasan banyak aktor internasional meletakkan keamanan maritim pada agenda keamanannya.³⁶ Keamanan maritim dapat diwujudkan melalui praktik keamanan yang dilakukan oleh aktor *sea power* dengan tujuan untuk meletakkan peran kekuatan angkatan laut dan menjalankan strateginya. Angkatan laut yang berada di wilayah maritim merupakan salah satu aktor utama dalam keamanan maritim. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat seberapa jauh angkatan laut negara bertindak di luar perairan teritorialnya, terlibat di wilayah lain selain wilayahnya sendiri dan hadir di perairan internasional.³⁷

Keamanan maritim membutuhkan kerja sama antar aktor dimana menurut laporan Sekretaris Jenderal PBB 2008 menekankan pentingnya kerja sama internasional dan keamanan maritim adalah tanggung jawab bersama dan memerlukan visi baru tentang keamanan kolektif. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan maritim bekerja sama untuk mengidentifikasi ancaman dan apa yang harus dilakukan terhadap hal tersebut. Aktor saling berbagi informasi dan mengoordinasikan kegiatan mereka. Menurut Karl Deutsch, komunitas keamanan maritim dipahami sebagai bentuk kerja sama politik yang sebagian besar ditandai dengan tidak adanya perang, penyelesaian konflik secara damai di antara anggota komunitas dan meningkatnya rasa saling percaya.³⁸

Melalui jurnalnya yang berjudul *Beyond Seablindness : A New Agenda for Maritime Security Studies*, Christian Bueger dan Timothy Edmunds

³⁶ Christian Bueger and Timothy Edmunds, "Beyond Seablindness : A New Agenda for Maritime Security Studies", Vol.93, (November, 2017) : hal 1293.

³⁷ Christian Bueger : hal 160.

³⁸ Christian Bueger : hal 162.

menjelaskan bahwa keamanan maritim disebarluaskan aktor melalui tata kelola keamanan maritim sebagai upaya mendistribusikan pengetahuan dalam sektor keamanan. Aktor melakukan tindakan keamanan maritim untuk menanggapi tantangan melalui tindakan yang berfokus pada kesadaran maritim, koordinasi serta operasi di lapangan.³⁹ Adapun cara yang dilakukan oleh aktor didefinisikan sebagai upaya dalam melakukan pengamanan terhadap wilayah maritim yang mencakup beberapa hal :⁴⁰

1. *Organizing maritime security and managing complexity.*

Melalui hal ini, aktor menggambarkan tantangan yang menghasilkan tanggapan mengenai keamanan maritim. Terdapat tiga level pada poin ini yaitu *epistemic level* yang menghasilkan suatu pengetahuan tentang keamanan maritim, *coordination level* yang merupakan koordinasi dalam melakukan tindakan dan *operational level* berupa operasi kegiatan di laut.

a. *Maritime Domain Awareness (MDA) and new epistemic infrastructure*

Merupakan suatu mekanisme dalam mengolah pengetahuan tentang lingkungan keamanan maritim. Pengembangan MDA berupaya dalam meningkatkan kesadaran para pelaut dengan cara memberikan informasi serta pengetahuan dalam melawan ancaman kejahatan di laut. MDA menyediakan data seperti gambaran pelacakan pergerakan kapal, pengawasan angkatan laut, pengintaian udara dan pengumpulan analisis data.

³⁹ Christian Bueger and Timothy Edmunds : hal 1302.

⁴⁰ Christian Bueger and Timothy Edmunds : hal 1302-1309.

b. *Coordination and maritime security governance*

Upaya ini merupakan bentuk koordinasi dan tata kelola tindakan dalam menghadapi tantangan. Tata kelola yang dimaksud seperti adanya *Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS)* yang bertujuan menyatukan aktor termasuk negara, organisasi internasional, perwakilan militer dalam melakukan diskusi dan koordinasi untuk menekan pembajakan. CGPCS juga memfasilitasi pengembangan sistem hukum terhadap penangkapan bajak laut, pemindahan, tuntutan dan penjara. Aktor yang tergabung dalam CGPCS memanfaatkan koordinasi ini untuk mewujudkan keamanan maritim.

c. *Operational coordination*

Merupakan aktivitas keamanan maritim yang dilakukan oleh aktor keamanan berupa tindakan operasi militer. Keamanan maritim mengarah pada praktik-praktik yang menghubungkan aktor, informasi dan tindakan.

2. *Governing maritime security abroad : capacity building and Security Sector Reform (SSR)*

Merupakan upaya dalam mendistribusikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan maritim yang dipimpin oleh aktor keamanan. Hal ini mendorong aktor untuk berbagi tanggung jawab dalam keamanan maritim dan berupaya dalam mengubah situasi dengan bersosialisasi atau praktik suatu pemerintahan di negara penerima. Adapun contoh tindakan yang dilakukan ialah berbagi pengetahuan, keterampilan, sosialisasi tentang kemaritiman, pelatihan militer dan sebagainya.

Melalui beberapa hal diatas, konsep keamanan maritim menurut Christian Bueger dan Timothy Edmunds membantu penulis untuk menganalisis upaya Denmark dalam mengamankan wilayah perairan lepas Tanduk Afrika dari tindakan pembajakan.

1.8 Metodologi Penelitian

Dalam memahami ilmu hubungan internasional secara epistemologis, dibutuhkan beberapa aspek salah satunya metodologi yang berisikan tentang prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena hubungan internasional itu diperoleh.⁴¹

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian deskriptif sebagai jenis penelitian. Penelitian deskriptif melibatkan pemetaan data yang menggambarkan peristiwa dan kemudian mengatur, menabulasi, menggambarkan, dan menjelaskan pengumpulan data.⁴² Melalui jenis penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan bagaimana upaya Denmark dalam mengamankan wilayah perairan lepas Tanduk Afrika dari kasus pembajakan. Upaya yang dilakukan Denmark bertujuan untuk mewujudkan pelayaran yang aman melalui kebijakan keamanan maritimnya.

1.8.2 Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian ini ialah dari tahun 2008 hingga tahun 2014.

Tahun 2008 didasari oleh tindakan Denmark dalam mengawal kapal *World*

⁴¹ Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional Didiplin dan Metodologi", Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, (1990) : hal 3.

⁴² The Association for Educational Communications and Technology, "Descriptive Research Methodologies", (2001) diakses melalui <http://members.aect.org/edtech/ed1/41/41-01.html>.

Food Program (WFP) untuk memberikan makanan ke wilayah Somalia yang terkena krisis. Hal ini merupakan tindakan pertama dalam memberikan keamanan di perairan lepas Tanduk Afrika setelah adanya keputusan Denmark untuk menjadikan pembajakan sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan keamanannya. Sedangkan tahun 2014 sebagai batasan tahun implementasi *Strategy for the Danish Counter Piracy Effort 2011-2014*.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisa merupakan suatu perilaku dari negara ataupun aktor lainnya yang hendak dideskripsikan.⁴³ Adapun unit analisa dalam penelitian ini ialah kebijakan keamanan maritim Denmark. Sedangkan unit eksplanasi merupakan sesuatu yang berdampak terhadap unit analisa yang hendak diamati maka hal yang menjadi unit eksplanasi penelitian ini adalah pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika. Selain unit analisa dan unit eksplanasi, terdapat tingkat analisa di dalam penelitian ini yang berada pada tingkat negara yaitu Denmark yang mengeluarkan kebijakan keamanan maritim terhadap pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan yang didapatkan melalui sumber-sumber tertulis. Menurut Mardalis, “studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material

⁴³ Mohtar Mas'ood : hal 39.

yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya”.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melakukan pengambilan data melalui beberapa sumber. Pertama, penulis mengambil data dari dokumen resmi kebijakan keamanan maritim Denmark terkait pembajakan yaitu *Strategy for the Danish Counter Piracy Effort 2011-2014* dan *Danish Maritime Authority*. Kedua, penulis mengutip pernyataan para politisi Denmark dalam beberapa report yaitu *Learning for Danish Counter-Piracy off the Coast of Somali* dan *Danish Foreign Policy Yearbook*. Ketiga, penulis menggunakan beberapa buku yang berjudul *Horn of Africa : Environmental Security Assessment*, *Piracy Along the Horn of Africa : An Analysis of the Phenomenon within Somalia* dan *Small States in the European Union*. Keempat, penulis menggunakan beberapa informasi dari website resmi seperti *EU Information Centre*, *Danish Ministry of Defense* dan *Combined Maritime Force*. Kelima, penulis mengumpulkan data dari beberapa jurnal yaitu *How Piracy is Affaecting Economic Development in Puntland Somalia*, *Beyond Seablindness : A New Agenda for Maritime Security Studies*, *What is Maritime Security*, *Piracy, Navies and Law of the Sea : The Case of Somalia*, *Piracy Around Africa’s West and East Coasts : A Comparative Political Perspective* dan sebagainya.

Adapun data yang diakses menggunakan *keyword* seperti *Piracy in the Coast off Horn of Africa*, *Danish Effort to Combat Piracy*, *The Danish Engagement in Africa* dan *Danish Maritime Security Policy*. Teknik ini

⁴⁴ Abdi Mirzaqon.T dan Dr. Budi Purwoko, S.Pd, M. Pd, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writting”, Jurnal BK Unesa, Vol.8, No.1, (2018) : hal 3.

merupakan bentuk data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti berasal dari sumber-sumber yang sudah ada.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting dikarenakan dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Adapun proses analisis dilakukan setelah melalui proses klasifikasi berupa pengelompokan atau pengumpulan dan pengkategorian data menjadi data terkait dan data kurang terkait. Kegiatan klasifikasi dilakukan setelah proses editing dan pemampatan data.⁴⁵

Berdasarkan hal diatas, penulis hanya melakukan analisis data melalui data terkait dikarenakan data-data yang dikumpulkan oleh penulis memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun dalam melakukan analisis data, penulis menggambarkan pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika sebagai landasan bagi Denmark dalam menjalankan kebijakan keamanan maritimnya. Sedangkan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, penulis menganalisis upaya Denmark dalam mengamankan perairan lepas Tanduk Afrika dari tindakan pembajakan yang menggunakan konsep keamanan maritim oleh Christian Bueger dan Timothy Edmunds. Berikut beberapa poin teknik analisis data yang disederhanakan oleh penulis :

1. Mengumpulkan beberapa data mengenai pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika, kepentingan Denmark dalam melawan pembajakan dan kebijakan keamanan maritim Denmark.

⁴⁵ P. Joko Subagyo, S.H, "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik", Jakarta : P.T Rineka Cipta, (2011) : hal 104-106.

2. Menganalisis penelitian melalui dua indikator konsep keamanan maritim untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian, yaitu :

a. *Organizing maritime security and managing complexity*

Pada aspek ini, penulis berfokus pada tindakan negara dalam membangun kesadaran maritim dan melakukan koordinasi dalam strategi kontra pembajakan. Adapun tindakan negara yang dianalisis ialah Denmark yang mengorganisir keamanan maritim dalam tiga aspek yaitu :

- Level epistemic, dimana tindakan Denmark ditemukan pada aturan otoritas maritim Denmark mengenai *Order on Technical on Measures for Preventing and Armed Robbery Against Danish Ship* dan *Executive Order Regarding the Use of Civil Transportation in Denmark*.
- Level koordinasi, dimana tindakan Denmark ditemukan pada jurnal *Small State in the CGPCS : Denmark, Working Group 2 and the end of the Debate on an International Piracy*.
- Level operasional, dimana tindakan Denmark ditemukan pada report *Learning for Danish Counter-Piracy off the Coast of Somali*.

b. *Governing maritime security abroad : capacity building and Security Sector Reform (SSR)*

Adapun fokus penelitian penulis ialah tindakan negara yang berupaya dalam membangun kapasitas di sekitar wilayah terjadinya pembajakan. Tindakan Denmark dalam hal ini

ditemukan melalui report yang berjudul *Evaluation of the Danish Engagement in and Around Somalia 2006-2010* dan situs resmi pemerintahan Denmark yaitu *Danish Ministry of Defense*.

1.9 Sistematika Penulisan

Dengan menggunakan sistematika penulisan, penulis membagi penelitian ke dalam lima bab, yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Mendeskripsikan dan menjelaskan isi dari pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAJAKAN DI PERAIRAN LEPAS TANDUK AFRIKA

Bagian ini menjelaskan perkembangan pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika yang kemudian menimbulkan dampak dalam berbagai hal. Dampak yang dirasakan memunculkan berbagai respon internasional seperti Resolusi DK PBB maupun beberapa misi angkatan laut untuk melawan pembajakan yang terus bergulir. Adapun beberapa respon internasional tersebut memiliki beberapa hambatan yang juga dijelaskan pada bagian ini.

BAB III : KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM DENMARK

Melalui bab ini dijelaskan dampak pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika terhadap Denmark yang kemudian menimbulkan tindakan bagi Denmark untuk mengeluarkan kebijakan keamanannya. Kebijakan ini

didasari oleh berbagai kepentingan dan kapabilitas yang dimiliki Denmark. Penulis juga menyajikan alasan Denmark yang tidak terlibat di dalam EUNAVFOR dalam melawan pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika.

BAB IV : UPAYA DENMARK DALAM MENGAMANKAN WILAYAH PERAIRAN LEPAS TANDUK AFRIKA DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan Denmark dalam mengamankan jalur laut internasional. Adapun tindakan Denmark dianalisis oleh penulis menggunakan konsep keamanan maritim seperti yang telah dijelaskan pada bagian bab 1 yaitu melalui kerangka konseptual. Penulis juga menyajikan beberapa pencapaian Denmark dalam mengamankan perairan lepas Tanduk Afrika dari tindakan pembajakan.

BAB V : PENUTUP

Di dalam bab terakhir ini, berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis Kebijakan Keamanan Maritim Denmark Terhadap Pembajakan di Perairan Lepas Tanduk Afrika”. Kemudian penulis juga akan menyajikan saran terhadap penelitian selanjutnya.